



KABUPATEN SIGI



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
DINAS NAKERTRANS

2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yaitu **“KABUPATEN SIGI MAJU, BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA”**.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi semakin jelas dan terarah, khususnya dalam menghadapi masalah pengangguran, kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Sigi. Mengingat masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Sigi sangat kompleks dan bukan hanya menjadi kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, melainkan juga OPD lain. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, karena berbagai keterbatasan yang ada, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari pembaca dan seluruh pihak yang terkait guna penyempurnaannya. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sigi, 30 September 2025

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Kabupaten Sigi

FEBRIANTO, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.19820212 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
BAB III.....	50
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	50
BAB IV	55
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Nakertrans Kabupaten Sigi.....	55
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Nakertrans Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	74
4.3 Sub Kegiatan Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Nakertrans Kabupaten Sigi Tahun 2025- 2029.....	88
BAB V.....	93
PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

TABEL 2.2.1	21
TABEL 2.2.2.....	22
TABEL 2.2.3.....	25
TABEL 2.3.1.....	29
TABEL 2.3.2.....	30
TABEL 2.3.3.....	30
TABEL 2.3.4.....	31
TABEL 2.3.5.....	32
TABEL 2.3.6.....	34
TABEL 2.3.7.....	38
TABEL 3.1.....	50
TABEL 3.2.....	52
TABEL 3.3.....	53
TABEL 4.1.....	57
TABEL 4.2.....	75
TABEL 4.3.....	89
TABEL 4.4.....	91
TABEL 4.5.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah periode 2025–2029. Instruksi ini menegaskan bahwa penyusunan Renstra harus dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan berbasis data, guna memastikan program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta visi dan misi kepala daerah terpilih.

Renstra Perangkat Daerah memiliki peran strategis sebagai dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah ke dalam strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja pada tingkat perangkat daerah, menyusun peta jalan pembangunan sektoral yang terukur dan berbasis hasil, serta menjadi dasar

penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD dan penganggaran berbasis kinerja.

Penyusunan Renstra juga mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dinamika pembangunan global, nasional, dan regional, serta berbagai tantangan strategis yang dihadapi, seperti transformasi digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, dan ketahanan daerah terhadap risiko sosial dan ekonomi.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi perlu menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra ini juga memperhatikan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya (2021–2026), yang menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dalam pelayanan ketenagakerjaan, masih terdapat tantangan signifikan, antara lain:

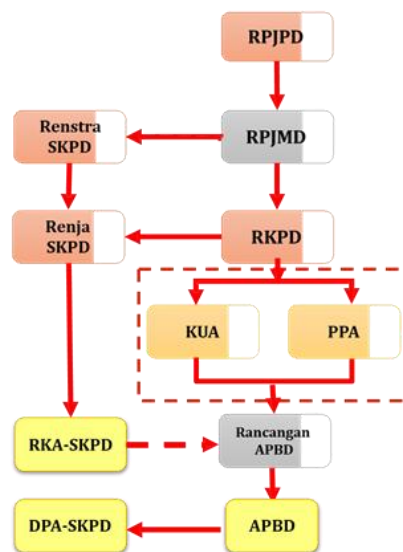
- Tingginya angka pengangguran terbuka, terutama pada usia produktif;
- Kesenjangan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
- Masih terbatasnya kesempatan kerja di daerah-daerah tertentu;

- Perlunya revitalisasi program transmigrasi agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Selain itu, transformasi digital, perkembangan dunia kerja pasca-pandemi, dan kebutuhan terhadap tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi menjadi isu strategis yang harus direspon melalui perencanaan yang adaptif dan responsif. Melalui dokumen Renstra ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi diharapkan dapat memperkuat peran dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, terserap, dan sejahtera, serta transmigrasi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang mengacu pada beberapa dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) daerah, dokumen perencanaan jangka panjang daerah serta dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang baik propinsi maupun nasional.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi dengan dokumen perencanaan lainnya dalam bagan dibawah ini :



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja dan jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi yang telah ditetapkan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (RENJA), sebagai penjabaran lebih rinci dari program kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk tahun berkenaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sigi tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 125);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pekerja Migran;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);
27. Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
28. Peraturan Bupati Sigi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi untuk periode 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah yang berfungsi untuk memberikan arah,

strategi, dan prioritas kebijakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Renstra ini disusun untuk menjabarkan visi dan misi Bupati Sigi sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah selanjutnya dituangkan ke dalam program dan kegiatan dinas secara terukur dan sistematis, guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi yang berbasis pada potensi unggulan pertanian dan pariwisata serta sebagai alat untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan sektoral dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029.

Sementara Penyusunan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi bertujuan untuk:

- Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi yang mendukung pengembangan tenaga kerja lokal serta transmigrasi produktif, selaras dengan potensi unggulan daerah berbasis pertanian dan pariwisata.
- Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam sasaran strategis, program, dan kegiatan dinas secara terukur dan terencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, melalui pengembangan perencanaan yang berbasis hasil (result-based planning) dan berbasis data (data-driven planning).

- Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, penganggaran kinerja, dan pengukuran capaian kinerja selama periode perencanaan 2025–2029.
- Mewujudkan tata kelola pelayanan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang responsif, adaptif, dan partisipatif, dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang kompeten, terserap, dan sejahtera serta mendukung mobilitas penduduk ke wilayah transmigrasi yang produktif dan berkelanjutan.
- Mendorong sinergi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, lembaga pelatihan kerja, serta komunitas lokal, dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan dan penyusunan garis besar isi dokumen Renstra ini diantaranya adalah :

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan Latar Belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa gambaran Kondisi yang mendasari disusunnya keterkaitan Renstra Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai-nilai strategis Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi Dasar Hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN ISU STRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

2.1 Sub Bab ini menyajikan gambaran Perangkat Daerah yang memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan, Mitra Layanan Perangkat Daerah, Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah serta Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

2.2 Sub Bab ini menyajikan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, yang memuat Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini Menyajikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan dan sasaran outcome dan output. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Setiap program dilengkapi indikator kinerja, target serta pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang harapan Renstra melalui Program urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam mendukung Keberhasilan Visi Misi Bupati lima tahun

ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

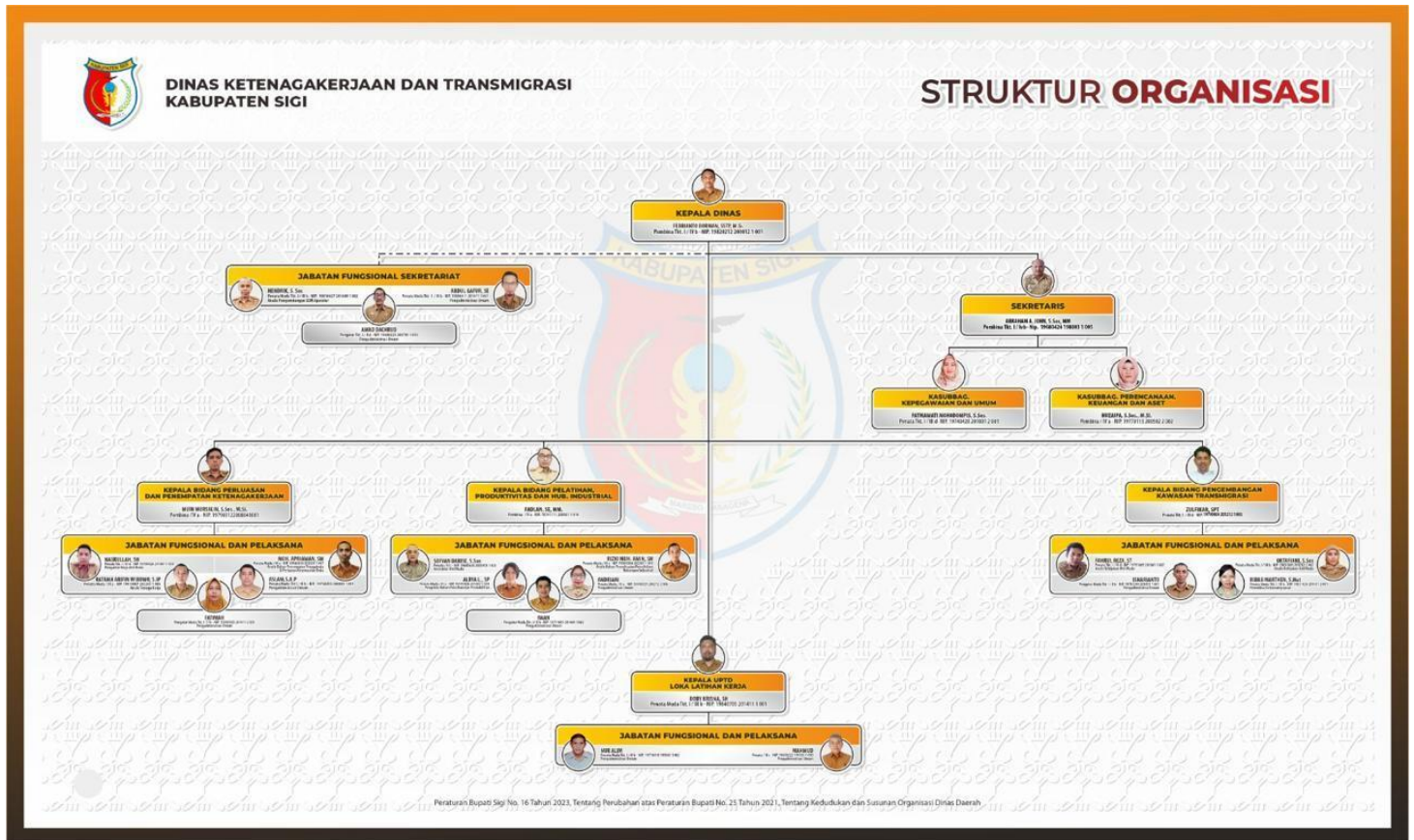
Menurut Peraturan Bupati Sigi Nomor 20 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyebutkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Bidang Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial serta Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Asset;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial;
- e. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Disnakertrans Kab. Sigi



Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Adapun uraian fungsi tiap bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang pengelolaan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- c. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran Dinas;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- g. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- h. pengelolaan urusan kepegawaian;
- i. pengelolaan data dan informasi;
- j. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, dan umum;
- l. pelaporan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, dan umum; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan penempatan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perluasan dan penempatan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan penempatan tenaga kerja;
- c. pengoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat di Daerah;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat di Daerah;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja di Daerah;
- f. pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat di Daerah;
- g. pelaksanaan pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Daerah;
- h. pelaksanaan pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Pekerja Migran Indonesia keluar negeri di Daerah;
- i. pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja antara pemerintah daerah dan perusahaan penempatan tenaga kerja;
- j. pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia di Daerah;
- k. pelaksanaan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna;

- l. pelaksanaan bursa kerja di Daerah;
 - m. pelaksanaan pemberian tanda daftar pada Bursa Kerja Khusus di daerah;
 - n. pemberian rekomendasi penerbitan izin pendirian lembaga bursa kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta di Daerah;
 - o. pengawasan dan pengendalian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta di Daerah;
 - p. pengoordinasian pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah;
 - q. penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah;
 - r. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah;
 - s. pelayanan antar kerja di Daerah;
 - t. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perluasan dan penempatan tenaga kerja;
 - u. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang perluasan dan penempatan tenaga kerja;
 - v. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan penempatan tenaga kerja; dan
 - w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di Daerah;
- d. pemberian rekomendasi penerbitan izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- f. pengoordinasian peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada lembaga pelatihan kerja swasta;
- g. pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan;
- h. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- i. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan tingkat produktivitas di Daerah;
- k. pemberian konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- l. pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Daerah;
- m. pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- n. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah;

- o. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi dalam Daerah;
 - p. penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan;
 - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pelatihan,
 - r. produktivitas dan hubungan industrial;
 - s. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas dan hubungan industrial; dan
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- c. pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
- d. pengoordinasian penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- e. perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;

- f. pengoordinasian pembangunan dan pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi;
- g. pelaksanaan penataan persebaran penduduk pada kawasan transmigrasi;
- h. pengoordinasian pengembangan ekonomi dan sosial budaya pada kawasan transmigrasi;
- i. evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi;
- j. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- l. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Loka Latihan Kerja

Loka Latihan Kerja (LLK) merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan.

Loka Latihan Kerja (LLK) melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan Fungsinya

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi sampai dengan Bulan Agustus 2025 adalah 44 orang yang terdiri dari :

- 1) PNS : 24 orang
- 2) CPNS : 1 orang
- 3) Kontrak Pemda : 19 orang
- 4) Kontrak Dinas : - orang
- 5) Kategori II : - orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2.1 dan tabel 2.2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Kategori Dua (K2)	Jumlah
I	-	-	-	-	-	-
II	2	-	-	-	-	2
III	17	1	-	-	-	18
IV	5	-	-	-	-	5
Tenaga Kontrak	-	-	19	-	-	19
Kategori Dua (K2)	-	-	-	-	-	-
TOTAL	24	1	19	-	-	44

Tabel 2.2.2**Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Kategori Dua (K2)	Jumlah
Laki-Laki	18	1	10	-	-	29
Perempuan	6	-	9	-	-	15
TOTAL	24	1	19	-	-	44

Sedangkan penugasannya ke sub unit sebagai berikut :

- 1) Sekretariat (8 orang PNS dan 12 Non PNS) : 20 orang
- 2) Bidang Penempatan Tenaga Kerja (6 PNS dan 2 Non PNS) : 8 orang
- 3) Bidang Pelatihan Produktivitas dan Hubungan Industrial (4 PNS dan 3 Non PNS) : 8 Orang
- 4) Bidang Transmigrasi (5 PNS dan 3 Non PNS) : 8 orang
- 5) UPT-Loka Latihan Kerja (3 Orang PNS dan 0 Non PNS) : 3 Orang
- 6) UPT-Transmigrasi : 0 orang

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan :

- 1) Esselon II b (Kepala Dinas) : 1 orang
- 2) Esselon III a (Sekretaris) : 1 orang
- 3) Esselon III a (Kepala Bidang) : 3 orang
- 4) Esselon IV a (Kasubag/Kasie) : 3 orang
- 5) Pejabat Fungsional : 3 orang
- 6) Pengawas Ketenagakerjaan : -
- 7) Pelaksana : 33 orang

Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah :

- 1) Membuat daftar nominatif, bazzeting dan daftar urutan kepangkatan pegawai (DUK), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), membuat usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pensiun, buku induk pegawai.
- 2) Pengembangan pegawai.
- 3) Mengelola daftar hadir.
- 4) Pembinaan pegawai.
- 5) Koordinasi pembuatan DP3/SKP.
- 6) Kesejahteraan pegawai.
- 7) Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional.

Mutasi Pegawai pada tahun 2024 s/d tahun 2025 jumlah pegawai yang mutasi baik ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi ataupun ke OPD lain adalah sebanyak 1 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Mutasi ke DLH Kab.Sigi : 1 orang

Sedangkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Golongan IV/b ke IV/c : 1 orang
2. Golongan III/a ke III/b : 2 orang
3. Golongan III/b ke III/c : 1 orang
4. Golongan II/d ke III/a : 1 orang

Pegawai yang mengikuti diklat tahun 2024 sampai 2025 baik yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) berjumlah 2 (dua) orang, yakni Diklat PIM II dan Diklat Ketenagakerjaan. Kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai pada tahun 2024 sampai 2025 yaitu mengurus hak



pegawai yang memasuki masa pensiun atau meninggal berupa Tunjangan Hari Tua, uang duka baik karena haknya yang melekat sebagai Pegawai Negeri maupun santunan dari Pemerintah Daerah dan KORPRI.

a) Jumlah pegawai yang mencapai usia pensiun : 1 orang

b) Jumlah Pegawai mendapatkan tunjangan

pernikahan pertama : 25 orang

c) Jumlah pegawai mendapatkan tunjangan rawat inap : - orang

Selain sumber daya manusia di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi juga perlu melihat dukungan aset dan sarana prasarana penunjang pelayanan dalam menjalankan tugas pokok fungsi. Untuk menggambarkan Keadaan Sarana dan prasarana dari tahun 2022-2025 seperti terurai pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.3
Sarana dan Prasarana Tahun 2022-2025

No	Nama Bidang Barang	Keadaan Per 31 Desember 2022		Keadaan Per 31 Desember 2023		Keadaan Per 31 Desember 2024		Keadaan Per 31 Desember 2025		Keterangan Kondisi Barang	
		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah harga (Rp)	Jumlah	
1	PERALATAN MESIN										
	Komputer Note Book	1	32.058.546							1 Baik	
	Charger Laptop	2	158.000							2 Baik	
	Hard Disk										
	Belanja Modal Pengadaan Laptop					2	18.700.000			2 Baik	
	Belanja Modal Pengadaan Mesin pemotong rumput										
	Genset	1	15.000.000							1 Baik	
	Alat Absensi Sidik Jari dan Scan Wajah	1	32.000.000							1 Baik	
2	PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA/ RAPAT PEJABAT										
	Lemari Arsip	2	2.000.000							2 Baik	
3	PENGADAAN PERALATAN CETAK										
	Pengadaan Printer	2	3.000.000	4	12.000.000	2	9.340.000			8 Baik	
	Printer Dan Scan A3	1	7.500.000							2 Baik	



4	PENGADAAN ALAT STUDIO										
	Kamera										
5	PENGADAAN LCD PROYEKTOR										
	LCD Proyektor	1	6.249.388			1	7.200.000			2 Baik	
	CCTV	2	1.756.000							2 Baik	
	Braket	1	382.479								1 Rusak
	Kabel	40	400.000							40 Baik	
	Kabel VGA 30 Meter	2	164.000							2 Baik	
	Bluens 2 VGA SVGA	1	100.000							1 Baik	
	TV 24 Inchi	1	6.263.521							1 Baik	
6	PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA										
	Meja 1/2 Biro	18	12.600.000	-	-	-	-	-	-	18 Baik	
	Kursi Manajer	1	3.061.968	-	-	-	-	-	-	1 Baik	
	Kursi Manajer	8	5.600.000	-	-	-	-	-	-	8 Baik	
	Kursi Plastik Napoli	18	2.038.032	-	-	50	7.400.000			68 Baik	
	Kursi Tamu	1	3.125.000			1	6.336.000			2 Baik	
	Kursi Pimpinan	1	3.498.000							1 Baik	
	Meja dan kursi	2	7.013.600							2 Baik	
	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja Pejabat Eselon II	1	7.000.000							1 Baik	
	Belanja Modal Pengadaan Gordyn										



7	PENGADAAN ALAT DAPUR										
	Pengadaan Dispenser										
	Pengadaan Kulkas										
	Pengadaan Exhaust Fair										
8	PENGADAAN ALAT PENDINGIN										
	Pengadaan AC	1	5.000.000			3	25.700.000			4 Baik	
	Kipas Angin Tornado										
	Pengeras suara										
9	GEDUNG DAN BANGUNAN										
	Pembayaran Pembangunan Gedung Kantor										
	Gedung dan Bangunan LLK 100 %										
10	JALAN DAN IRIGASI										
	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan										
11	BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR										
	Belanja Modal Pengadaan Meubelair			1	8.000.000					1 Baik	
	JUMLAH KESELURUHAN	113	114.567.867	23	873.427.080	1	74.676.000	11		173 Baik	1 Rusak

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Salah satu masalah penting harus ditangani terkait dengan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah masalah pengangguran. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang lebih terfokus agar upaya penanganan pengangguran benar-benar terarah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional mengingat masalah pengangguran mempunyai implikasi yang sangat luas bagi masalah sosial, politik dan keamanan.

Untuk mengatasi masalah pengangguran perlu dibuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi para pencari kerja di Kabupaten Sigi agar dapat mewujudkan sumber daya yang sejahtera sesuai dengan misi ke 2 Bupati Sigi. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk Angkatan kerja. Pada tahun 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sigi sebesar 75.92 Memiliki arti di Kabupaten Sigi dari 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 69 orang tergolong Angkatan kerja. Sedangkan pada Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tahun 2024 sebesar 97.45 persen mengalami kenaikan dibandingkan pada Tahun 2023 angka TKK sebesar 97.40 persen. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2024 sebesar 2,25 hal ini merupakan dari 100 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Sigi terdapat sekitar 3 sampai 4 orang berstatus pengangguran. Angka tersebut berubah tiap tahunnya dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar
Menurut Tingkat Pendidikan

Uraian	TAHUN				
	Satuan	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	%	70,76	72,69	70,94	75,92
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,38	3,02	2,60	2,55
Tingkat kesempatan Kerja (TKK)	%	97,62	96,98	97,40	97,45

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi dalam Angka 2025, diolah kembali

Skala umur merupakan informasi yang sangat penting berkaitan dengan perkembangan persentase kelompok sasaran pembangunan, dan Proporsi penduduk usia kerja (produktif) menentukan tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Sigi. Pada Tahun 2024, jumlah penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja adalah 152.638 penduduk (75,92 persen), sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah sebanyak 44.414 penduduk (24,08 persen).

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dari total angkatan kerja pada Tahun 2024, penduduk Kabupaten Sigi yang bekerja tercatat sebesar 97,45 persen sedangkan yang diklasifikasikan sebagai penganggur sekitar 2,55 persen. Proporsi pencari kerja terbesar yang mendaftar pada Dinas Ketenagakerjaan pada Tahun 2024 berpendidikan terakhir SMA/Sederajat yaitu 425 pekerja (Disnakertrans Kab. Sigi 2024).

Tabel 2.3.2
Daftar Pencari Kerja Terdaftar Yang Sudah Bekerja
Menurut Tingkat Pendidikan

URAIAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
	Bekerja	Bekerja	Bekerja	Bekerja
Tidak Sekolah/Belum/Tamat SD/Sekolah Dasar	2	10	6	-
Sekolah menengah Pertama	12	21	23	2
Sekolah Menengah Atas	52	531	208	76
Sekolah Menengah Kejuruan	20	171	83	32
Diploma I/II/III/	3	36	19	2
Universitas	20	178	86	43

Sumber : BPS, Kab. Sigi dalam Angka 2025, diolah kembali

Tabel 2.3.3
Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan
Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Tahun	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan						
	L	P	Sarjana	DI/DII/DIII	SMK	SMA	SMP	SD	Putus Sekolah
2021	493	300	221	30	187	333	20	2	-
2022	672	275	178	47	230	706	26	11	-
2023	564	294	190	29	189	414	29	7	-
2024	585	343	249	22	175	425	37	24	

Sumber : Dinas Nakertrans Kab. Sigi 2025; diolah

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Sigi Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi pada Tahun 2024 sebesar 928 pekerja. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan jumlah pencari kerja sebanyak 858 orang.

Perbandingan pencari kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, jumlah laki-laki terdaftar sebanyak 585 orang dan perempuan sebanyak 343 orang.

Sementara Pencari kerja yang ditempatkan selama periode Tahun 2023-2024 cenderung menurun, yaitu pada tahun 2023 sebanyak 425 orang dan pada tahun 2024 sebanyak 223 orang. disebabkan adanya beberapa perusahaan nasional dan swasta yang membuka cabang dan mulai beroperasi di Kabupaten Sigi seperti Perbankan, Alfamidi, SPBU, cafe, restoran, villa dan penginapan. Dan terselenggaranya program pelatihan kompetensi dinas ketenagakerjaan Kabupaten sigi dengan baik yang memungkinkan terbukanya lapangan kerja dan terbentuknya wira usaha baru sehingga dapat merekrut tenaga kerja. Hal ini merupakan langkah baik untuk mengatasi angka pengangguran di Kabupaten Sigi. Terkait dengan proporsi Calon Tenaga Kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan, Secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Table 2.3.4
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar
dan Yang Ditempatkan Tahun 2021-2024

Tahun	Terdaftar	Ditempatkan	Keterangan
2021	109	793	Pencari kerja yang ditempatkan di Perusahaan lokal dan di Luar Negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2022	947	1256	
2023	858	425	
2024	223	928	

Sumber : Dinas Nakertrans Kab. Sigi 2025

2. Urusan Pilihan Transmigrasi

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan

sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya melalui peningkatan ekonomi berbasis masyarakat dengan mengembangkan potensi lokal daerah di sektor pertanian, UMKM dan sektor lainnya. Realisasi indikator transmigran yang ditempatkan selama Tahun 2020-2024 dapat diuraikan pada Tabel 2.3.5 di bawah ini :

Table 2.3.5
Jumlah Penempatan Transmigrasi
Berdasarkan Lokasi dan Jumlah Jiwa Tahun 2020-2024

Tahun	Lokasi	Jumlah dalam penempatan	
		KK	Jiwa
2020	-	-	-
2021			
2022	Lemban Tongoa (SP 2)	15	64
2023	-	-	-
2024	-	-	-
Jumlah		15	64

Sumber : Dinas Nakertrans Kab. Sigi 2025

Pada Tahun 2020, 2021, 2023, dan 2024 penempatan transmigrasi belum dilaksanakan mengingat ketersediaan lahan yang harus diidentifikasi dan penyelesaian lokasi calon transmigrasi. Penempatan transmigrasi dilaksanakan pada tahun 2022 mencakup satu tahapan di UPT Lembantongoa SP 2. Penempatan Transmigrasi di UPT Lemban Tongoa (SP 2) pada tahun 2022 berjumlah 15 KK, warga Transmigran Penduduk Asal

(TPA) berjumlah 7 KK dan Transmigran Penduduk Setempat (TPS) berjumlah 8 KK.

Masyarakat transmigran ini belum mengalami peningkatan ekonomi secara signifikan, namun masih terus dilakukan pembinaan selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan harapan potensi-potensi yang sudah di inventarisir dapat dikembangkan melalui berbagai pelatihan pada Unit Pemukiman Transmigrasi.

Pada RPJMD 2021-2026 pembangunan transmigrasi difokuskan pada revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo yang terbagi kedalam 3 (tiga) Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yaitu SKP A, SKP B dan SKP C dimana terdapat 2 UPT Unit Permukiman Transmigrasi yaitu UPT Bulupountu dan UPT Lemban Tongoa. Revitalisasi kawasan dimaksud adalah berupa :

- a. Pemenuhan Sisa Daya Tampung (SDT) pada Satuan Permukiman yang masih memiliki Sisa Daya Tampung;
- b. Pembangunan Fasilitas Umum pada Satuan Permukiman;
- c. Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung pada Kawasan Transmigrasi.

Tingkat capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan sasaran / target Renstra periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.3.6 di bawah ini :



Tabel 2.3.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

TC 23

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Capaian Kinerja RPJMD Akhir Periode	Satuan	Target Renstra Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih		3.60	3.60	Jumlah	70	96	128	160	192		0	68	563	20	0,00	0,00	0,53	3,52	0,10
2	Jumlah pencari kerja yang bersertifikat kompetensi		64	64	Jumlah	16	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jumlah Tenaga Kerja yang terdata di Perusahaan/ Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan kesehatan		25	25	Jumlah	60	65	70	75	80	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah KK transmigran binaan yang berhasil		0	0	Jumlah	50	70	100	150	200	0	45	52	90	0	0,00	0,64	0,52	0,60	0,00

Dari tabel 2.3.6 diatas, dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan yang ditunjukkan melalui capaian indikator kinerja sasaran pada akhir RPJMD (Tahun 2024) yaitu **45,75 %** dan termasuk dalam skala penilaian **kurang berhasil**. Tidak tercapainya kinerja kegiatan disebabkan karena pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 terjadi refocusing anggaran.

Pada Bidang Tenaga Kerja peluang kesempatan kerja untuk mengurangi tingginya angka pengangguran terbuka mengalami peningkatan target. Hal ini dikarenakan penambahan jumlah pencari kerja yang signifikan. Diketahui bahwa Pada tahun 2024 jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 928 orang, sedangkan yang ditempatkan sebanyak 223 orang atau 24,03 %.

Akan tetapi capaian target kegiatan pada tahun 2024 mencapai hasil yang maksimal dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2024 jumlah pencari kerja yang dilatih ditargetkan sebanyak 20 orang yang terealisasi sebanyak 20 Orang (100%), dengan berbagai macam pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan di bidang ketenagakerjaan. Guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja salah satunya adalah pelatihan pertukangan yang dilaksanakan di 16 Kecamatan. Demikian pula halnya pada kegiatan pelatihan uji kompetensi yang ditargetkan 100 orang dapat mencapai target 100%.

Sementara pada Bidang Transmigrasi, jika dilihat pada tabel 2.3.5 diatas penetapan target setiap tahun semuanya tercapai 100%. Karena dapat diukur dari tingkat keberhasilan masyarakat trans yang semakin berhasil. Sejak awal penempatan Transmigrasi yakni pada tahun 2011 hingga pada akhir tahun 2024 masyarakat trans baik yang bermukim di Lembantongoa maupun di Bulupountu sudah mencapai 450 KK. Terdiri dari 3 Satuan Pemukiman (SP.1 dan 2) di Lembantongoa berjumlah 350 KK dan SP. 3 di Bulupountu berjumlah 100 KK. Akan tetapi pada tahun 2025 belum dilaksanakan Pembangunan Transmigrasi karena adanya efisiensi. Namun demikian tetap akan



direncanakan pembangunan Transmigrasi pada Tahun 2026 yang didukung dengan dokumen perencanaan studi Rencana Satuan Kawasan Pembangunan (RSKP) dan dilanjutkan Rencana Tata Ruang Unit Pemukiman Transmigrasi (RTUPT).

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada table 2.3.7 berikut ini

Tabel 2.3.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah





PROGRAM PRIORITAS	Anggaan pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM/ KEGIATAN	5.297.502.860	3.026.423.862	4.025.571.380	5.178.675.394	4.036.783.354	5.211.617.680	2.888.166.947	3.802.108.966	4.786.789.726	3.951.991.855	98,38	95,43	94,45	92,43	97,90	-0,82	-1,12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.316.490.800	2.744.577.297	2.973.562.343	2.759.788.875	2.576.546.472	2.257.314.081	2.618.520.382	2.802.632.406	2.670.713.054	2.499.258.747	97,45	95,41	94,25	96,77	97,00	3,25	2,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.316.490.800	2.070.615.052	2.314.840.266	2.366.071.915	2.511.553.472	2.257.314.081	1.955.495.669	2.176.747.460	2.281.010.542	2.434.273.726	94,45	94,44	94,03	96,40	96,92	2,39	2,36
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		10.200.000	17.680.000	11.850.000			10.200.000	6.800.000	11.850.000		0,00	100,00	38,46	100,00	0,00	-14,91	-14,77
Administrasi Umum Perangkat Daerah		158.035.820	191.731.677	61.588.960	9.313.000		149.397.343	181.859.447	61.262.960	9.312.000	0,00	94,53	94,85	99,47	99,99	-32,86	-32,35
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		61.151.000					61.151.000	0			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00



Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		304.04 6.425	341.600 .000	258.050 .000	8.000.0 00		302.881 .425	331.100. 000	258.050. 000	8.000.0 00	0,00	99,62	96,93	100,00	100,00	-27,25	-27,41
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		140.52 9.000	107.710 .400	62.228. 000	47.680. 000		139.394 .945	106.125. 499	58.539.5 52	47.673. 021	0,00	99,19	98,53	94,07	99,99	-22,24	-21,82
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.818.5 83.842	0	0	0	0	1.801. 283.06 1	0	0	0	0	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.205. 882						12.205. 882	0	0	0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	23.000. 000						23.000. 000				100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional Perkantoran	1.783.3 77.960						1.766.0 77.179				99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0	13.680 .000	434.21 8.465	2.140.0 44.422	680.42 4.052	0	13.680. 000	408.956. 634	1.849.77 7.819	674.53 5.107	0,00	100,0 0	94,18	86,44	99,13	849,69	794,56
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		13.680. 000	434.218 .465	2.110.5 54.422	562.82 4.052		13.680. 000	408.956. 634	1.849.77 7.819	556.935 .107	0,00	100,0 0	94,18	87,64	98,95	846,71	792,97



Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				29.490.000	117.600.000				0	117.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	74,69	0,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.049.500.000	49.990.000	212.442.947	50.400.000	341.432.030	1.043.592.694	49.990.000	204.004.947	50.400.000	341.276.201	99,44	100,00	96,03	100,00	99,95	182,73	178,68
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	0	49.990.000	212.442.947	50.400.000	36.100.000		49.990.000	204.004.947	50.400.000	36.100.000	0,00	100,00	96,03	100,00	100,00	55,08	51,11
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	0				305.332.030					305.176.201	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	42.000.000					41.925.000					99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	1.007.500.000					1.001.667.694					99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0	48.168.000	0	0	0	0	42.817.000	0	0	0	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	0	48.168.000					42.817.000				0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0	66.676.565	72.502.625	122.768.000	244.948.000	0	62.745.565	70.044.732	112.536.006	243.489.000	0,00	94,10	96,61	91,67	99,40	44,40	47,17



Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	66.676.565	72.502.625	122.768.000	244.948.000		62.745.565	70.044.732	112.536.006	243.489.000	0,00	94,10	96,61	91,67	99,40	44,40	47,17
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	112.928.218	103.332.000	277.245.000	105.674.097	171.660.000	109.427.844	100.414.000	262.570.247	103.362.847	171.660.000	96,90	97,18	94,71	97,81	100,00	40,09	39,67
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		103.332.000	277.245.000	105.674.097	171.660.000		100.414.000	262.570.247	103.362.847	171.660.000	0,00	97,18	94,71	97,81	100,00	42,22	41,73
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	41.861.844	0	0	0	0	41.161.844	0	0	0	0	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	71.066.374	0	0	0	0	68.266.000	0	0	0	0	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		0	55.600.000	0	21.772.800	0	0	53.900.000	0	21.772.800	0,00	0,00	96,94	0,00	100,00	-25,00	-25,00
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	0	0	55.600.000	0	21.772.800	0	0	53.900.000	0	21.772.800	0,00	0,00	96,94	0,00	100,00	-25,00	-25,00



Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TC 24

Dari tabel 2.3.7. diatas, dapat dilihat rasio rata – rata realisasi anggaran, dimana komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja pegawai dengan rasio rata – rata realisasi anggaran sebesar 96,18 % sedangkan komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai dan belanja modal dengan rasio rata - rata realisasi anggaran mencapai 96,18 % dan belanja barang dan jasa dengan rasio rata – rata realisasi anggaran sebesar 95,35%.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil dengan cara memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja berbasis ekonomi kerakyatan. Sehubungan dengan hal tersebut kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha dan sektor pertanian, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, salah satunya melalui pengembangan usaha ekonomi produktif atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pemanfaatan sektor perindustrian, pertanian, perkebunan, peternakan dan sektor lainnya adanya investasi modal usaha yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan serapan tenaga kerja.

sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu upaya yang cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri. Karena keterbatasan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pencari kerja yang pada umumnya berpendidikan SLTA ke bawah, sehingga kesempatan kerja terbuka pada umumnya untuk jenis - jenis pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan keterampilan khusus ternyata juga menimbulkan berbagai kasus mulai dari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikan (pengguna jasa), sampai pemulangan paksa (deportasi) karena statusnya yang ilegal.

Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran dan disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job (jabatan) yang dibutuhkan.

Melihat kenyataan tersebut masalah ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran terbuka (*open unemployment*) merupakan masalah nasional yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting yaitu disamping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran dengan cara meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. Berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi pada kenyataannya

memperoleh animo dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Namun demikian hal tersebut bukanlah alasan untuk berpuas diri melainkan sebaliknya merupakan penambah semangat untuk terus berinovasi termasuk mengadopsi perkembangan serta kemajuan teknologi untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi

Berdasarkan kondisi, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan kondisi lingkungan strategis, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Kewenangan di bidang, ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- 2) Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan ketenagakerjaan dan transmigrasi serta mekanisme kerja yang sudah ada.
- 3) Potensi daerah yang masih sangat terbuka untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis agraris.
- 4) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
- 5) Tersedianya anggaran dan SOP layanan

KELEMAHAN (W):

- 1) Jaringan informasi, ketenagakerjaan dan transmigrasi belum tersedia
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia profesional
- 3) Sarana dan prasarana penunjang kerja belum memadai
- 4) Anggaran yang sangat terbatas
- 5) Kurangnya tenaga fungsional di bidang tenaga kerja.

- 6) Belum adanya industri skala besar dan sedang, yang ada hanya home industri.
- 7) Minimnya kesadaran pemilik perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya pada asuransi ketenagakerjaan.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1). Jumlah perusahaan yang berjumlah 105 perusahaan (masih skala Kecil).
- 3). Banyaknya lembaga pelatihan kerja swasta.
- 4). Letak Kabupaten Sigi yang strategis sebagai daerah penyangga Kota Palu.
- 5). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi yang tinggi 6,49% per tahun (di atas rata-rata nasional),
- 6). Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan transmigrasi.
- 7). Kebijakan nasional tentang tenaga kerja dan transmigrasi.

ANCAMAN (T):

- 1). Tingginya jumlah penduduk miskin
- 2). Jumlah Pengangguran di Kabupaten Sigi relatif tinggi sehingga membutuhkan banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja;
- 3). Kualitas tenaga kerja yang masih rendah.
- 4). Potensi pelanggaran norma dan syarat kerja.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- 1). Pembinaan kepada organisasi ketenagakerjaan
- 2). Pelatihan SDM (PNS) di bidang ketenagakerjaan
- 3). Meningkatkan keterampilan tenaga kerja

- 4). Meningkatkan peran sosial perusahaan.
- 5). Melaksanakan transmigrasi
- 6). Meningkatkan retribusi ketenagakerjaan

2. **Strategi W-O**

- 1). Pembinaan lembaga pelatihan swasta
- 2). Membuat jaringan atau sistem informasi kesejahteraan ketenagakerjaan dan transmigrasi
- 3). Meningkatkan sarana dan prasarana
- 4). Optimalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat.

3. **Strategi S-T**

- 1) Menurunkan jumlah pengangguran terbuka
- 2) Meningkatkan keterampilan pencari kerja
- 3) Perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal
- 4) Peningkatan keselamatan pencari kerja.
- 5) Peningkatan hubungan industrial yang harmonis
- 6) Hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
- 7) Peningkatan fasilitas perbaikan taraf hidup pekerja
- 8) Pembinaan organisasi pekerja

4. **Strategi W-T**

- 1). Pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan kerja.
- 2). Pemberdayaan masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja
- 3). Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan tenaga kerja.
- 4). Menambah sarana dan prasarana transmigrasi.

2.5 Permasalahan Dians Nakertrans Kabupaten Sigi

Permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Kabupaten Sigi dalam upaya pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian saat ini adalah masalah tingginya angka pengangguran dan kurangnya kesempatan kerja di Kabupaten Sigi. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang lebih terfokus agar upaya penanganan pengangguran benar-benar terarah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional mengingat masalah pengangguran mempunyai implikasi yang sangat luas bagi masalah sosial, politik dan keamanan. Untuk mengatasi masalah pengangguran perlu dibuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi para pencari kerja di Kabupaten Sigi dengan strategi meningkatkan kemandirian dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing berbasis agribisnis, mengembangkan usaha mikro ekonomi kreatif berjiwa kewirausahaan, memanfaatkan potensi lokal daerah dan pengembangan sector perindustrian, pertanian, perkebunan, peternakan dan sector lainnya.

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020 sebesar 3.35 hal ini merupakan dari 100 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Sigi terdapat sekitar 3 sampai 4 orang berstatus pengangguran. (Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020). Terkait dengan permasalahan tersebut berikut ini akan digambarkan pemetaan permasalahan yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan



dan Transmigrasi



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Disnakertrans Kabupaten Sigi Tahun 2025 - 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kesempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Kesempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja serta kesejahteraan transmigrasi		Rasio Penduduk Bekerja	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	
Meningkatnya kesejahteraan transmigrasi			Pendapatan per kapita di wilayah transmigrasi	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	
		Meningkatnya Efektifitas Administrasi Kesekretariatan	Persentase Efektifitas administrasi kesekretariatan	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya produktivitas dan penempatan tenaga kerja lokal pada	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	2,10	2,11	2,17	2,25	2,30	2,30	
			Persentase Tenaga Kerja di sektor prioritas yang	69	70	72	74	76	78	



		sektor formal dan informal	meningkat produktivitasnya							
			Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di dalam negeri	16	20	24	28	32	36	
			Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	1.496	1.526	1.566	1.676	1.746	1.826	
		Meningkatnya kesejahteraan transmigran	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	20	20	20	20	20	20	
			Persentase Luas kawasan transmigrasi yang berkembang	20	20	20	20	20	20	
			Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	20	20	20	20	20	20	

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Disnakertrans Kabupaten Sigi Tahun 2025 - 2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melakukan Riset untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja di Kabupaten Sigi. Menyusun rencana program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi yang relevan, serta mengidentifikasi sektor industri yang berpotensi menyerap tenaga kerja.	Menyusun kurikulum pelatihan yang berbasis pada kebutuhan pasar dan meningkatkan keterampilan sesuai dengan standar industri. Membangun kemitraan dengan perusahaan- perusahaan lokal dan nasional untuk menciptakan peluang magang dan penyerapan tenaga kerja.	Melaksanakan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi di berbagai bidang, seperti teknologi, manufaktur, pariwisata, dan pertanian, sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan pasar kerja. Memberikan pelatihan dengan metode praktis dan berbasis industri.	Memperluas peluang magang dan penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama yang lebih intens dengan perusahaan dan industri besar di Kabupaten Sigi. Mengoptimalkan program magang untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja dalam dunia industri.	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dan magang dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Mengembangkan program pelatihan berkelanjutan untuk menanggapi perubahan kebutuhan pasar kerja dan memperkuat konektivitas antara pendidikan, pelatihan, dan dunia kerja.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Disnakertrans Kabupaten Sigi Tahun 2025 - 2030

No	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Aksesibilitas Wilayah Transmigrasi: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan di wilayah transmigrasi untuk mendukung kegiatan ekonomi. Selain itu, menyediakan akses pembiayaan dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat transmigrasi agar dapat mengembangkan usaha produktif, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, guna meningkatkan pendapatan per kapita dan mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur untuk meningkatkan Aksesibilitas Wilayah kawasan Transmigrasi: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan di wilayah transmigrasi untuk mendukung kegiatan ekonomi. Selain itu, menyediakan akses pembiayaan dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat transmigrasi agar dapat mengembangkan usaha produktif, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, guna meningkatkan pendapatan per kapita dan mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.	Transmigrasi



		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Kerja: Menyediakan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Sigi, serta memperkuat kerjasama dengan perusahaan untuk menciptakan peluang magang dan penyerapan tenaga kerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi kesenjangan keterampilan dan meningkatkan daya saing di pasar kerja.	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Kerja: Menyediakan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Sigi, serta memperkuat kerjasama dengan perusahaan untuk menciptakan peluang magang, penyerapan tenaga kerja dan peluang kerja baru melalui berbagai usaha dan kegiatan bisnis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi kesenjangan keterampilan dan meningkatkan daya saing di pasar kerja.	Ketenagakerjaan
--	--	---	--	-------------------------------

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Nakertrans Kabupaten Sigi

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi daerah, diperlukan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terarah, terukur, dan sesuai dengan permasalahan aktual di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya serta identifikasi isu strategis, Disnakertrans menetapkan program-program prioritas yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penguatan sistem pelatihan vokasi, serta pengembangan kawasan transmigrasi.

Kegiatan dan sub kegiatan disusun untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, seperti pelatihan kerja berbasis kompetensi, penyelenggaraan bursa kerja, sertifikasi tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta fasilitasi dan pemantapan transmigrasi. Seluruh perencanaan tersebut dirancang agar selaras dengan sasaran strategis daerah, mendukung penurunan tingkat pengangguran, serta menciptakan tenaga kerja yang adaptif terhadap dinamika pasar kerja.

Masing-masing program dan kegiatan telah dilengkapi dengan tujuan, sasaran berupa outcome dan output serta indikator masing-masing kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia setiap



tahunnya. Keselarasan mulai dari visi, rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran sampai dengan penetapan pendanaan indikatif. Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Nakertrans Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :



Tabel 4.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran - Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.3.4	Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.1.5	Meningkatnya produktivitas dan penempatan tenaga kerja lokal pada sektor formal dan informal	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Pendapatan Per Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
							Persentase Kab./Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
							- Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro - Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		Terlaksananya pelatihan angkatan kerja berdasarkan unit kompetensi	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							- Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga) - Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit) - Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
							Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
						Terlaksananya pembinaan LPK Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
						Terlaksananya penerbitan rekomendasi ijin LLK	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
							Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	
						Terlaksananya peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
							Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Meningkatnya rasio Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
					Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Terlaksananya fasilitasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) bagi tenaga kerja lokal	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
							- Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang) - Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							- Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD - Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang) - Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)		
							Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	Pelayanan antar Kerja	
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	Perluasan Kesempatan Kerja	
						Terlaksananya penerbitan ijin LPTKS	Persentase ijin LPTKS	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah ijin LPTKS	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	
							Jumlah Dokumen pengawasan dan pengendalian LPTKS	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	
						Terlaksananya pelayanan Informasi Pasar Kerja	- Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen) - Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							- Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)		
							Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	Job Fair/Bursa Kerja	
						Terlaksananya advokasi Pekerja Migran	- Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan - Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang) Kompetensinya (Orang)	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							- Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)		
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
							Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
							Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
					Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Tersusunnya Peraturan Perusahaan yang disahkan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
							- Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pengupahan (Laporan) - Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan) - Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)		
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
						Terlaksananya penyelesaian Kasus	- Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja) - Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga) - Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara) - Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara) - Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
	2.3.5	Meningkatkan					Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kesejahteraan Transmigrasi							
			3.1.2	Meningkatnya pengembangan wilayah baru	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi		Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
						Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	- Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen) - Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen) - Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi) - Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Transmigrasi (Hektar)		
							Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	
							Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	
							Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Hektar)	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
							Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
					Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi kawasan transmigrasi		Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
						Terlaksananya penempatan Transmigran Penduduk Asal	- Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(TPA) pada satuan permukiman	Mendapatkan Pelatihan (Orang) - Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga) - Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (Kepala Keluarga) - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) - Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (Dokumen) - Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							- Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (Dokumen)	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	
							Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	
							Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Ditempatkan (Kepala Keluarga)	berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	Penyuluhan Transmigrasi	
							Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	Pelatihan Transmigrasi	
							Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (Kepala Keluarga)	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	
					Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi		Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
						Terlaksananya permukiman yang dibina	- Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							- Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)		
							Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	
							Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Nakertrans Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Rancangan Rencana Strategis Dinas Nakertrans Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun tidak hanya mencakup aspek perencanaan dan pengendalian, tetapi juga evaluasi yang terstruktur untuk mengukur pencapaian hasil dan kinerja pembangunan secara menyeluruh. Fokus utama adalah meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta kolaborasi antar berbagai sektor dan stakeholders.

Program-program yang direncanakan dalam Renstra ini akan difokuskan pada keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD, penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah yang melibatkan analisis data dan informasi guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, sistem informasi dan pengelolaan data juga akan diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Pendanaan yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan telah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan sumber daya yang tersedia. Tabel berikut ini menyajikan rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Renstra Dinas Nakertrans Kabupaten Sigi untuk periode 2026-2030, yang menggambarkan target, output, serta pagu anggaran yang diperlukan untuk setiap tahunnya.



Tabel 4. 2

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Nakertrans Kab. Sigi Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4.719.030.976		4.813.411.595		4.909.679.827		5.007.873.424		5.108.030.892		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.390.985.656		2.438.805.369		2.487.581.476		2.537.333.106		2.588.079.768		
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase Efektifitas administrasi kesekretariatan (%)	-	100	2.390.985.656	100	2.438.805.369	100	2.487.581.476	100	2.537.333.106	100	2.588.079.768	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	1				1				1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	1				1				1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	1				1				1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	1				1				1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	2				2				2			2
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
2.07.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
2.07.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.194.320.336		2.204.320.336		2.224.320.336		2.230.070.336		2.240.070.336		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	25	2.194.320.336	25	2.204.320.336	25	2.224.320.336	25	2.230.070.336	25	2.240.070.336		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.149.320.336		2.149.320.336		2.149.320.336		2.149.320.336		2.149.320.336		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	25	2.149.320.336	25	2.149.320.336	25	2.149.320.336	25	2.149.320.336	25	2.149.320.336		
2.07.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45.000.000		55.000.000		75.000.000		80.750.000		90.750.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	1	45.000.000	1	55.000.000	1	75.000.000	1	80.750.000	1	90.750.000		
2.07.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.200.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000		
2.07.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.200.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatasausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000	1	10.200.000		
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				63.465.320		79.285.033		88.061.140		107.062.770		120.109.432		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	2	63.465.320	2	79.285.033	2	88.061.140	2	107.062.770	2	120.109.432		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	2		2		2		2					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	2		2		2		2					





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	12	53.000.000	12	55.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	12				12				12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	12				12				12				
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000			
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000			
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				28.000.000		30.000.000		40.000.000		45.000.000		55.000.000			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	12	28.000.000	12	30.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	55.000.000			
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				31.000.000		51.000.000		61.000.000		81.000.000		98.700.000			
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	16	31.000.000	16	51.000.000	16	61.000.000	16	81.000.000	16	98.700.000			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	16				16				16				
2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000		50.000.000		60.000.000		80.000.000		93.700.000			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	16	30.000.000	16	50.000.000	16	60.000.000	16	80.000.000	16	93.700.000			
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		5.000.000			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	16	1.000.000	16	1.000.000	16	1.000.000	16	1.000.000	16	5.000.000			
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648			
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	-	2,11	300.000.000	2,17	306.000.000	2,25	312.120.000	2,3	318.362.400	2,3	324.729.648	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648			
Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	-	25	300.000.000	30	306.000.000	35	312.120.000	40	318.362.400	45	324.729.648			
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	-	1				1				1				
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				150.000.000		153.000.000		156.060.000		159.181.200		162.364.824			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	-	1	150.000.000	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.181.200	1	162.364.824		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				150.000.000		153.000.000		156.060.000		159.181.200		162.364.824		
Terlaksananya fasilitas penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	-	25	150.000.000	30	153.000.000	35	156.060.000	40	159.181.200	45	162.364.824		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.428.045.320		1.456.606.226		1.485.738.351		1.515.453.118		1.545.762.180		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	-	70	1.428.045.320	72	1.456.606.226	74	1.485.738.351	76	1.515.453.118	78	1.545.762.180	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				856.827.192		873.963.736		891.443.010		909.271.870		927.457.308		
Terlaksananya pelatihan angkatan kerja berdasarkan unit kompetensi	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	-	1	856.827.192	1	873.963.736	1	891.443.010	1	909.271.870	1	927.457.308		
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	-	100		80		120		90		110			
	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	-	1		1		1		1		1			
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				728.303.114		742.869.177		757.726.560		772.881.091		788.338.713		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	-	100	728.303.114	80	742.869.177	120	757.726.560	90	772.881.091	110	788.338.713		
2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				42.841.359		43.698.186		44.572.149		45.463.592		46.372.865		
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	-	1	42.841.359	1	43.698.186	1	44.572.149	1	45.463.592	1	46.372.865		
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				85.682.719		87.396.373		89.144.301		90.927.187		92.745.730		
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	-	1	85.682.719	1	87.396.373	1	89.144.301	1	90.927.187	1	92.745.730		
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				299.889.517		305.887.307		312.005.054		318.245.155		324.610.058		
Terlaksananya pembinaan LPK Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	-	3	299.889.517	3	305.887.307	3	312.005.054	3	318.245.155	3	324.610.058		
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				299.889.517		305.887.307		312.005.054		318.245.155		324.610.058		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	-	3	299.889.517	3	305.887.307	3	312.005.054	3	318.245.155	3	324.610.058		
2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				142.804.532		145.660.623		148.573.835		151.545.312		154.576.218		
Terlaksananya penerbitan rekomendasi ijin LLK	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	-	3	142.804.532	3	145.660.623	3	148.573.835	3	151.545.312	3	154.576.218		
2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				142.804.532		145.660.623		148.573.835		151.545.312		154.576.218		
Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	-	3	142.804.532	3	145.660.623	3	148.573.835	3	151.545.312	3	154.576.218		
2.07.03.2.04 - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				71.402.266		72.830.311		74.286.918		75.772.656		77.288.109		
Terlaksananya peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	-	10	71.402.266	10	72.830.311	10	74.286.918	10	75.772.656	10	77.288.109		
2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				71.402.266		72.830.311		74.286.918		75.772.656		77.288.109		
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	-	10	71.402.266	10	72.830.311	10	74.286.918	10	75.772.656	10	77.288.109		
2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				57.121.813		58.264.249		59.429.534		60.618.125		61.830.487		
Meningkatnya rasio Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	-	1	57.121.813	1	58.264.249	1	59.429.534	1	60.618.125	1	61.830.487		
2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				57.121.813		58.264.249		59.429.534		60.618.125		61.830.487		
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	-	1	57.121.813	1	58.264.249	1	59.429.534	1	60.618.125	1	61.830.487		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	-	20	300.000.000	24	306.000.000	28	312.120.000	32	318.362.400	36	324.729.648	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				120.000.000		121.000.000		123.000.000		125.000.000		128.367.248		
Terlaksananya fasilitasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) bagi tenaga kerja lokal	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	40	40	120.000.000	50	121.000.000	60	123.000.000	70	125.000.000	80	128.367.248		
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	40	40		50		60		70		80			
	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	-	40		50		60		70		80			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	5	5		5		5		5		5			
2.07.04.2.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja				0		0		0		0		0		
Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0		
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja				40.000.000		41.000.000		41.000.000		41.000.000		41.000.000		
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	40	40	40.000.000	50	41.000.000	60	41.000.000	70	41.000.000	80	41.000.000		
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				30.000.000		30.000.000		32.000.000		32.000.000		35.367.248		
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	40	40	30.000.000	50	30.000.000	60	32.000.000	70	32.000.000	80	35.367.248		
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				0		0		0		0		0		
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0		
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				50.000.000		50.000.000		50.000.000		52.000.000		52.000.000		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	-	40	50.000.000	50	50.000.000	60	50.000.000	70	52.000.000	80	52.000.000		
2.07.04.2.02 - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya penerbitan ijin LPTKS				0		0		0		0		0		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				50.000.000		52.000.000		52.000.000		55.242.400		56.242.400		
Terlaksananya pelayanan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	-	1	50.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000	1	55.242.400	1	56.242.400		
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	-	10		10		10		10		10			
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	-	10		10		10		10		10			
2.07.04.2.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				0		0		0		0		0		
Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	-	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				0		0		0		0		0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	-	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0		
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				50.000.000		52.000.000		52.000.000		55.242.400		56.242.400		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	-	10	50.000.000	10	52.000.000	10	52.000.000	10	55.242.400	10	56.242.400		
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				130.000.000		133.000.000		137.120.000		138.120.000		140.120.000		
Terlaksananya advokasi Pekerja Migran	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	-	20	130.000.000	20	133.000.000	20	137.120.000	20	138.120.000	20	140.120.000		
	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	-	20		20		20		20					
	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	-	5		5		5		5					
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				30.000.000		30.000.000		30.000.000		31.000.000		32.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	-	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	31.000.000	20	32.000.000		
2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				20.000.000		20.000.000		21.000.000		21.000.000		22.000.000		
Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	-	20	20.000.000	20	20.000.000	20	21.000.000	20	21.000.000	20	22.000.000		
2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				80.000.000		83.000.000		86.120.000		86.120.000		86.120.000		
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	-	5	80.000.000	5	83.000.000	5	86.120.000	5	86.120.000	5	86.120.000		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648		
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	-	9,68	300.000.000	12,9	306.000.000	16,13	312.120.000	19,35	318.362.400	22,58	324.729.648	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				165.000.000		168.300.000		171.666.000		175.099.320		178.601.307		
Tersusunnya Peraturan Perusahaan yang disahkan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	-	5	165.000.000	5	168.300.000	5	171.666.000	5	175.099.320	5	178.601.307		
	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	-	10		10		10		10					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Data dan Informasi Sarana Hi (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	-	2		2		2		2		2			
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				42.900.000		43.758.000		44.633.160		45.525.823		46.436.340		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	-	5	42.900.000	5	43.758.000	5	44.633.160	5	45.525.823	5	46.436.340		
2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan				39.600.000		40.392.000		41.199.840		42.023.837		42.864.314		
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	-	10	39.600.000	10	40.392.000	10	41.199.840	10	42.023.837	10	42.864.314		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				82.500.000		84.150.000		85.833.000		87.549.660		89.300.653		
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana Hi (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	-	2	82.500.000	2	84.150.000	2	85.833.000	2	87.549.660	2	89.300.653		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				135.000.000		137.700.000		140.454.000		143.263.080		146.128.341		
Terlaksananya penyelesaian Kasus	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	-	1	135.000.000	1	137.700.000	1	140.454.000	1	143.263.080	1	146.128.341		
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	-	12.539		12.559		12.579		12.599		12.619			
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	-	1		1		1		1		1			1
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				13.500.000		13.770.000		14.045.400		14.326.308		14.612.834		
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	-	2	13.500.000	2	13.770.000	2	14.045.400	2	14.326.308	2	14.612.834		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.250.000		20.655.000		21.068.100		21.489.462		21.919.251		
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan (Perkara)	-	2	20.250.000	2	20.655.000	2	21.068.100	2	21.489.462	2	21.919.251		
2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				6.750.000		6.885.000		7.022.700		7.163.154		7.306.417		
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	-	1	6.750.000	1	6.885.000	1	7.022.700	1	7.163.154	1	7.306.417		
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				6.750.000		6.885.000		7.022.700		7.163.154		7.306.417		
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	-	1	6.750.000	1	6.885.000	1	7.022.700	1	7.163.154	1	7.306.417		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				87.750.000		89.505.000		91.295.100		93.121.002		94.983.422		
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	-	12.539	87.750.000	12.559	89.505.000	12.579	91.295.100	12.599	93.121.002	12.619	94.983.422		
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				900.000.000		918.000.000		936.360.000		955.087.200		974.188.944		
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648		
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	-	20	300.000.000	20	306.000.000	20	312.120.000	20	318.362.400	20	324.729.648	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648		
Terlaksananya Perencanaan calon lokasi transmigrasi yang berstatus 2C dan 3L	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	-	1	300.000.000	1	306.000.000	1	312.120.000	1	318.362.400	1	324.729.648		
	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Hektar)	-	20		20		20		20					
	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	-	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	-	1		1		1		1					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.32.02.2.01.0001 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi				75.000.000		76.500.000		78.030.000		79.590.600		81.182.412		
Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	-	1	75.000.000	1	76.500.000	1	78.030.000	1	79.590.600	1	81.182.412		
3.32.02.2.01.0002 - Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan				75.000.000		76.500.000		78.030.000		79.590.600		81.182.412		
Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	-	1	75.000.000	1	76.500.000	1	78.030.000	1	79.590.600	1	81.182.412		
3.32.02.2.01.0003 - Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi				75.000.000		76.500.000		78.030.000		79.590.600		81.182.412		
Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Hektar)	-	20	75.000.000	20	76.500.000	20	78.030.000	20	79.590.600	20	81.182.412		
3.32.02.2.01.0004 - Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				75.000.000		76.500.000		78.030.000		79.590.600		81.182.412		
Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	-	1	75.000.000	1	76.500.000	1	78.030.000	1	79.590.600	1	81.182.412		
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648		
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	-	20	300.000.000	20	306.000.000	20	312.120.000	20	318.362.400	20	324.729.648	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648		
Terlaksananya penempatan Transmigran Penduduk Asal (TPA) pada satuan permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	-	2	300.000.000	2	306.000.000	2	312.120.000	2	318.362.400	2	324.729.648		
	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	-	20		20		20		20		20			
	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (Kepala Keluarga)	-	5		5		5		5		5			
	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	-	10		10		10		10		10			10



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)	-	20		15		15		15		15			
3.32.03.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				42.000.000		43.000.000		44.000.000		45.000.000		46.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	-	2	42.000.000	2	43.000.000	2	44.000.000	2	45.000.000	2	46.000.000		
3.32.03.2.01.0002 - Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran				42.000.000		43.000.000		44.000.000		45.000.000		46.000.000		
Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (Dokumen)	-	1	42.000.000	1	43.000.000	1	44.000.000	1	45.000.000	1	46.000.000		
3.32.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi				42.000.000		43.000.000		44.000.000		45.000.000		46.000.000		
Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)	-	20	42.000.000	15	43.000.000	15	44.000.000	15	45.000.000	15	46.000.000		
3.32.03.2.01.0004 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				42.000.000		43.000.000		44.000.000		45.000.000		46.000.000		
Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	-	10	42.000.000	10	43.000.000	10	44.000.000	10	45.000.000	10	46.000.000		
3.32.03.2.01.0005 - Penyuluhan Transmigrasi				42.000.000		43.000.000		44.000.000		45.000.000		46.000.000		
Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	-	1	42.000.000	1	43.000.000	1	44.000.000	1	45.000.000	1	46.000.000		
3.32.03.2.01.0006 - Pelatihan Transmigrasi				48.000.000		48.000.000		48.120.000		48.362.400		48.729.648		
Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	-	20	48.000.000	20	48.000.000	20	48.120.000	20	48.362.400	20	48.729.648		
3.32.03.2.01.0007 - Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi				42.000.000		43.000.000		44.000.000		45.000.000		46.000.000		
Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (Kepala Keluarga)	-	5	42.000.000	5	43.000.000	5	44.000.000	5	45.000.000	5	46.000.000		
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	-	20	300.000.000	20	306.000.000	20	312.120.000	20	318.362.400	20	324.729.648	2.07.3.32.0.00.02.00 00 - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648		
Terlaksananya permukiman yang dibina	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	-	3	300.000.000	3	306.000.000	3	312.120.000	3	318.362.400	3	324.729.648		
	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	-	50		50		50		50		50			
3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman				150.000.000		153.000.000		156.060.000		159.181.200		162.364.824		
Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	-	50	150.000.000	50	153.000.000	50	156.060.000	50	159.181.200	50	162.364.824		
3.32.04.2.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman				150.000.000		153.000.000		156.060.000		159.181.200		162.364.824		
Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	-	3	150.000.000	3	153.000.000	3	156.060.000	3	159.181.200	3	162.364.824		

4.3 Sub Kegiatan Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Nakertrans Kabupaten Sigi Tahun 2025- 2029

Untuk mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan. Salah satu fokus utama pembangunan daerah adalah penguatan sektor ketenagakerjaan guna menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sub kegiatan prioritas disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang masih dihadapi Kabupaten Sigi, antara lain rendahnya kompetensi angkatan kerja, terbatasnya akses informasi pasar kerja, serta belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Oleh karena itu, sub kegiatan seperti pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan transmigrasi diprioritaskan guna menjawab kebutuhan pembangunan dan selaras dengan arah kebijakan nasional dan daerah. Dengan pelaksanaan sub kegiatan prioritas ini, diharapkan tercipta sinergi antar program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Sigi.

Tabel berikut ini merinci sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan, dengan fokus pada penyusunan dokumen perencanaan, program dan kegiatan perangkat daerah untuk mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sigi tahun 2026-2030

Tabel 4. 3

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Nakertrans Kab. Sigi Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelayanan antar Kerja	
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
			Perluasan Kesempatan Kerja	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			Job Fair/Bursa Kerja	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyuluhan Transmigrasi	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Pelatihan Transmigrasi	
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran Dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	
			Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	
			Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS NAKERTRANS KAB. SIGI									
NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Rasio Penduduk yang bekerja	%	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	
2.	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	%	5,7	5,6	5,8	5,9	6,0	6,1	



Tabel 4. 5

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS NAKERTRANS KAB. SIGI TAHUN 2025-2030									
NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Efektifitas administrasi kesekretariatan	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	2,1	2,11	2,17	2,25	2,3	2,3	
3.	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	69	70	72	74	76	78	
4.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	16	20	24	28	32	36	
5.	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	orang	1.496	1.526	1.566	1.676	1.746	1.826	
6.	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	%	20	20	20	20	20	20	
7.	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%	20	20	20	20	20	20	
8.	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	20	20	20	20	20	20	

BAB V

PENUTUP

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah **perencanaan yang berkualitas**, yaitu perencanaan yang mencerminkan skala prioritas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, membuka peluang partisipasi masyarakat, serta menjamin transparansi.

Sebagai tahap awal dalam pelaksanaan pembangunan, perencanaan harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Dalam konteks tersebut, **perencanaan pembangunan berbasis data** menjadi sangat penting. Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi landasan dalam merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Melalui pendekatan berbasis data, arah pembangunan dapat lebih terukur, efektif, dan efisien, serta mampu meminimalisir potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, data juga memungkinkan adanya evaluasi yang jelas terhadap capaian pembangunan, sehingga pengembangan daerah di masa depan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Selain kualitas perencanaan, terdapat beberapa **faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah**, antara lain:

1. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** – Aparat perencana maupun pelaksana pembangunan harus memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
2. **Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi** – Penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring pembangunan.

3. **Partisipasi Masyarakat** – Keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi menjadi kunci agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
4. **Konsolidasi dan Koordinasi Antar Lembaga** – Sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, dan kelompok masyarakat akan memperkuat efektivitas pembangunan.
5. **Pendanaan yang Memadai dan Transparan** – Keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang cukup, tepat sasaran, serta dikelola secara akuntabel.
6. **Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** – Komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan good governance akan memastikan pembangunan berjalan konsisten sesuai visi dan misi yang ditetapkan.

Namun demikian, upaya mewujudkan perencanaan yang memenuhi kriteria tersebut seringkali menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia aparatur perencana. Oleh karena itu, diperlukan **konsolidasi internal yang berkesinambungan** di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, sekaligus penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan serta pemanfaatan data pembangunan.

Dengan semangat tersebut, diharapkan **Renstra Kabupaten Sigi** ini dapat menggambarkan sekaligus menjabarkan visi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029, yaitu:

**“KABUPATEN SIGI, MAJU BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN
DAN PARIWISATA.”**

Sigi, 30 September 2025
Kepala Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Sigi


FEBRIANTO, S.STP.,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 19660619 198711 2 001